

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 1993
- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta 2013,
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Garfika, Jakarta, 2011
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta, 1995
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT.Pradnya Paraminta, Jakarta,2006,
- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2002,
- Daeng Naja, , *Hukum Kredit dan Bank Garansi*,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip PembaharuanAgraria* , Raja Wali Pers, Jakarta, 2009,
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahit dari Perjanjian.*,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014,
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kotrak dalam Presfektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Pratikum Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan).*, Bandung Mandar Maju, 2012
- Philipus M, Hadjon dkk, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada Universit press, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987,  
Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Cet ke-3 Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH UNAIR, 1995

Supriadi, *KEHUTANAN DAN HUKUM PERKEBUANAN DI INDONESIA*, Sinar Grafika, Jakarta 2011

Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Grafika, Bandung, hlm. 42014, Salim, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2015

Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 2012,

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957

Wiryono Projudikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Alumni, Bandung, 1981

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset Desa.

Peraturan Pemerintah daerah Sumatera Barat nomor 16 TAHUN 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.3706/MENHUTVII/IPDSH/2014 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan Peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (revisi VI)

Keputusan Mentari Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia Nomor: SK. 2312/Menhut\_II/IPDSH/2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pembrian izin Baru pemanfaatan hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Pegguaan Lain (Revisi VIII)

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Mentari Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan Di wilayah Privinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar

Peraturan Bupati Agam nomor 41 tahun 2009 tentang izin Usaha Kawasan Pariwisata

### 3. Makalah

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Adminitrasi* , Makalah pada Penataan Hukum Adminitrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995

### 4. Media Online

Website : [beritadaerah.co.id](http://beritadaerah.co.id) /2014/12/10/10-permesalahan-investasi-di-indonesia/

Website : <https://abunajmu.wordpress.com/2011/08/24/jenis-dokumen-lingkungan-2/>

Website : <http://www.walhi-riau.or.id/wp-content/uploads/2015/04/Analisis-Moratorium-2015-finalLL.pdf>